

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Achmad, Ali dan Chomzah 2004, *Hukum Agraria (Pertanahan) Indonesia, Jilid I*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta.
- Al Rashid, Harun, 1986, *Sekilas Tentang Jual Beli Tanah (berikut Peraturan-peraturannya)*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Arba, 2005, *Hukum Agraria Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- A.P. Parlindungan, 1989, *Landreform Di Indonesia, Suatu Studi Perbandingan, Alumni*, Bandung, hlm. 123.
- Arikunto, Suharismi, 1995, *Dasar-Dasar Research*, Tarsoto, Bandung.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Harsono, Boedi, 1999, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA*, Djambatan, Jakarta.
- Harsono, Boedi, 2003, *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional dalam Hubungannya dengan TAP MPR RI I/MPR/2001*, Penerbit Tri Sakti, Jakarta.
- Harsono, Boedi, 2007, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Harsono, Boedi, 2008, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Hartanto, J.Andy, 2015, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Kepemilikan Tanah*, LaksBang Justicia, Surabaya.
- Mustofa, 2010, *Tuntunan Pembuatan Akta-Akta PPAT*, Karya Media, Yogyakarta.
- Parlindungan, AP, 1987, *Landreform di Indonesia Siatu Perbandingan, Alumni*, Bandung.
- Perangin, Effendi, 1994, *Praktik Jual Beli Tanah*, Raja Grafindo, Persada, Jakarta.

- Poerwardaminta, 1987, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Retnoningsih, Ana dan Suharso, 2014, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, CV. Widya Karya, Semarang.
- Sahnan, 2016, *Hukum Agraria Indonesia*, Setara Press, Malang.
- Santoso, Urip, 2012, *Hukum Agraria Kajian Komperhensif*, Kencana, Jakarta.
- Soetomo, 2001, *Pedoman Jual Beli Tanah Peralihan Hak dan Sertifikat*, Lembaga Penerbitan Universitas Brawijaya.
- Sri Wibawanti, Erna dan R. Murjiyanto, *Hak Atas Tanah dan Peralihannya*, Liberty, Yogyakarta.
- Suardi, 2005, *Hukum Agraria*, Penerbit Ilham, Jakarta.
- Sumardjono, Maria S.W., 2009, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Suprpto, 1986, *Bertanam Jagung*, Penebar Swadaya, Jakarta.
- Supriadi, 2010, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sutedi, Adrian, 2017, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wahid, Muchtar 2008, *Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah*, Republika, Jakarta.

2. Makalah/ Jurnal/ Artikel/ Skripsi- Tesis-Desertasi

- Agus Suherlie, "Strategi Peralihan Hak Atas Tanah Yang Menyebabkan Kepemilikan Tanah Absentee Di Kabupaten Karanganyar", *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Elva Kurnia Dewi, 2010, "Peran Kantor Pertanahan Dalam Mengatasi Kepemilikan Tanah Absentee di Kabupaten Magelang", *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043).

Undang-undang Nomor 56 PRP Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Lembar Negara Tahun 1960 Nomor 174720, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21 17).

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).

Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 280, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2322) Junto Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 112).

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1977 tentang Pemilikan Tanah Pertanian Secara Guntai (Absentee) Bagi Para Pensiunan Pegawai Negeri (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3094).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696).

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385).

Instruksi Bersama Menteri dalam Negeri dan Otonomi Daerah dengan Menteri Agraria Tanggal 5 Januari Tahun 1961 dengan Nomor Sekra 9/1/12.

Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2005 tentang Jarak Kepemilikan Tanah Pertanian Di Luar Kecamatan Yang Berbatasan Di Kabupaten Bantul.

4. Internet

Absente (Def.1) (n.d). Dalam kamus Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses melalui <https://kbbi.web.id/absente>. Diakses pada tanggal 3 Maret 2019.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul,
<https://bantulkab.bps.go.id/dynamictable/2018/12/12/52/luas-lahan-sawah-lahan-bukan-sawah-dan-lahan-bukan-pertanian-menurut->

kecamatan-di-kabupaten-bantul-2017-hektar-.html, diakses pada tanggal
20 November 2019

Guntai (Def.1) (n.d). Dalam kamus Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses
melalui <https://kbbi.web.id/guntai> . Diakses pada tanggal 3 Maret 2019.

<https://distantp.baliprov.go.id/lahan-pertanian-pangan-berkelanjutan/>, diakses
pada tanggal 11 April 2019.

Pemerintah Kabupaten Bantul, Kecamatan Pandak,
<https://kecpandak.bantulkab.go.id/hal/profil>, diakses pada tanggal 11
Desember 2019